

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR 156/Pid.B/2024/PN.Plg DALAM PENGURUSAN
MASUK KEPOLISIAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUSUF EKA MAHENDRA

22.10.0013P

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yusuf Eka Mahendra
NPM : 22100013P
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg
Dalam Pengurusan Masuk Kepolisian

Palembang, 1 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

H. Yudi Fabrian, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

ERNIWATI, S.H., M.HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Eka Mahendra

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 22 April 2001

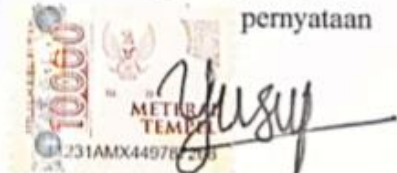
NPM : 22.10.0013P

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan yang ada dalam pembahasan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil dari pengamatan, penelitian pengelolaan serta pemikiran penulis dan di arahkan oleh pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 1 Agustus 2025
pernyataan

A blue official stamp from Universitas IBA Palembang is visible. It contains the text 'UNIVERSITAS IBA', 'PALEMBANG', 'METIR TEMPEL', and a unique identifier '231AMX44976-203'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Yusuf Eka Mahendra
22.10.0013P

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg Dalam Pengurusan masuk Kepolisian. Kasus ini menarik untuk ditelaah karena mencerminkan adanya penyimpangan hukum dalam proses rekrutmen calon anggota Polri yang seharusnya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Terdakwa, yang bukan bagian dari institusi kepolisian, menjanjikan kepada korban dapat meluluskan anaknya menjadi anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang yang pada akhirnya tidak dikembalikan. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, Perkapolri, dan Putusan Pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggambarkan fakta-fakta hukum, unsur-unsur pidana, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana yang relevan, seperti teori *strict liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah teori *responsibility* dan *accountability*, karena hukum pidana menerapkan asas *culpabilitas*. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum serta adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa. Seharusnya majelis hakim memberikan hukuman dengan melihat pada pasal 65 yang mengharuskan jika ada dua pasal yang maksimal pidananya sama, maka harus mengambil satu saja dan ditambah sepertiganya. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 5 tahun 3 bulan serta membebaskan ganti rugi uang korban setelah terdakwa keluar dari penjara. Upaya non penal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, bahwa rekrutmen anggota kepolisian tidaklah dimintai biaya (gratis). Lembaga Kepolisian disarankan lebih transparan dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri. Lembaga kepolisian harus tegas jika ada oknum anggota kepolisian yang ikut terlibat. berikan pemecatan dan laporkan ke pengadilan supaya diberikan sanksi pidana yang lebih berat. Dengan demikian diharapkan masyarakat sadar akan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana, Rekrutmen Polri, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This thesis is entitled Juridical Analysis of Palembang District Court Decision Number 156/Pid.B/2024/PN.Plg in Police Entry Processing. This case is interesting to examine because it reflects legal irregularities in the recruitment process for prospective Polri members which should be clean, transparent, accountable, and humane. The defendant, who is not part of the police institution, promised the victim that he could pass his child to become a Polri member in exchange for a sum of money that was ultimately not returned. The problem of this thesis is how the form of criminal responsibility in District Court Decision Number 156/Pid.B/2024/PN.Plg, and how the Judge's considerations in District Court Decision Number 156/Pid.B/2024/PN.Plg. This research uses a normative legal research method with a case study approach. Data were obtained through a literature study that includes primary legal materials such as the Criminal Code, Police Chief Regulations, and Court Decisions, as well as secondary legal materials from literature and opinions of legal experts. The analysis was conducted qualitatively by describing the legal facts, criminal elements, and relevant theories of criminal responsibility, such as the theory of strict liability, responsibility, and accountability. The results of the study indicate that the theory of criminal responsibility used is the theory of responsibility and accountability, because criminal law applies the principle of culpability. Criminal responsibility in this case is based on the defendant's ability to be legally responsible and the existence of errors in the form of intent. The defendant has fulfilled the elements of Article 372 and 378 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement and fraud. The Panel of Judges in its consideration sentenced the defendant to two years and six months in prison. The panel of judges should have given a sentence by looking at Article 65 which requires that if there are two articles with the same maximum penalty, then only one must be taken and added to one third. So that if added up to 5 years and 3 months and impose compensation on the victim after the defendant is released from prison. Non-penal efforts by providing education to the public by utilizing social media, that the recruitment of police members is free of charge. The National Police (Polri) is advised to be more transparent in its recruitment process. The police must be firm in handling any police officers involved. They should be dismissed and reported to the courts for harsher criminal sanctions. This is expected to raise public awareness of the law.

Keywords: Crime, Embezzlement, Criminal Accountability, National Police Recruitment, Court Decisions